

**ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP *OPEN LEGAL POLICY*
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Oleh

NEHA HIFA HAQ

NIM. 05020721042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neha Hifa Haq
NIM : 05020721042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN
KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METRA TEMPEL
PT 1D9AJX48666847

Neha Hifa Haq
NIM. 05020721042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Neha Hifa Haq
NIM. : 05020721042
Judul : ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN
KONSEP *OPEN LEGAL POLICY* PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 07 Februari 2025

Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Neha Hifa Haq

NIM. : 05020721042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji III



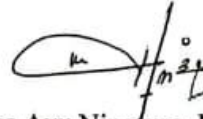
Achmad Saifudin R., S.H., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 28 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NEHA HIFA HAGA
NIM : 05020721042
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : hifaneha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS PERKEMBANGAN PEMAKNAAN KONSEP OPEN LEGAL POLICY

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XX/2022

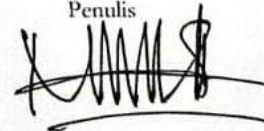
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 JUNI 2025

Penulis



(NEHA HIFA HAGA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan pemaknaan *open legal policy* berupa penambahan norma baru klasifikasi pengecualian perkara *open legal policy* yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022. Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana perkembangan konsep *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana perkembangan pemaknaan konsep *open legal policy* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yakni UUD 1945 dan UU MK, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *open legal policy*, *case approach* yakni pendekatan pada kasus Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 dan pendekatan komparatif yakni dikomparasikan dengan negara Amerika Serikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif yang mengacu pada UUD 1945 dan UU MK kemudian disajikan secara deduktif yakni membahas *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *open legal policy* dalam Putusan MK No 112/PUU-XX/2022 untuk menjawab rumusan masalah.

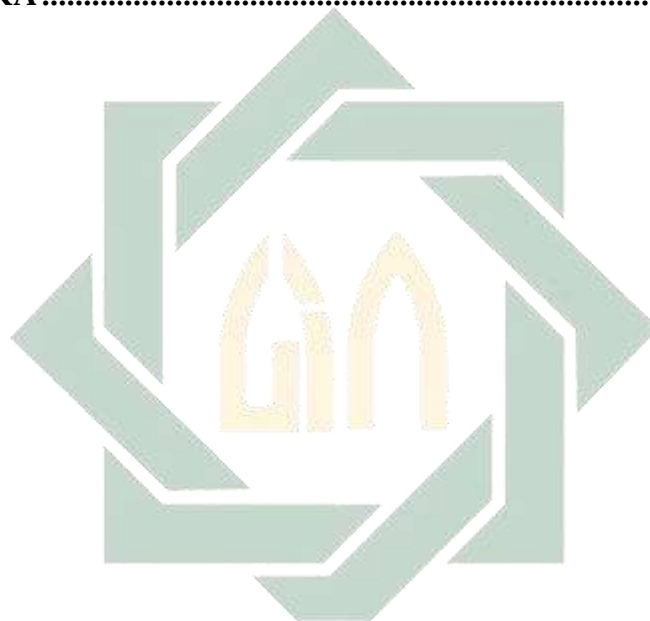
Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2005 hingga sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022 yakni melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, ketidakadilan yang *intolerable* ranah kelembagaan, aturan tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan problematika kelembagaan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), menimbulkan konstusionalitas warga negara, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan, bertentangan dengan hak politik, bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022 terdapat penambahan norma baru klasifikasi pengecualian *open legal policy* yang dapat diadili di mahkamah konstitusi yakni ketidakadilan yang intolerable ranah individu dan menimbulkan persoalan yang menyebabkan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: Pertama, mendorong Mahkamah Konstitusi untuk lebih teliti dalam memeriksa perkara *open legal policy* apakah perkara tersebut masuk klasifikasi pengecualian *open legal policy* ataupun tidak. Kedua, Merevisi UU MK dengan menambahkan norma *open legal policy* sebagai upaya kepastian hukum manakala Mahkamah Konstitusi mengadili perkara *open legal policy* yang serupa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	31
A. Teori Pembagian Kekuasaan.....	31
1. Penertian Pembagian Kekuasaan	31
2. Sistematika pembagian kekuasaan di Indonesia.....	33
B. Teori <i>Open Legal Policy</i>	37
1. Pengertian <i>Open Legal Policy</i>	37
2. Sistematika <i>Open Legal Policy</i> di Indonesia	43
BAB III PERKEMBANGAN KONSEP OPEN LEGAL POLICY OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	46
A. Pemaknaan <i>Open Legal Policy</i> Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	46
B. Komparasi <i>Open Legal Policy</i> di Negara Lain	70
BAB IV TINJAUAN ANALISIS PERKEMBANGAN OPEN LEGAL POLICY	

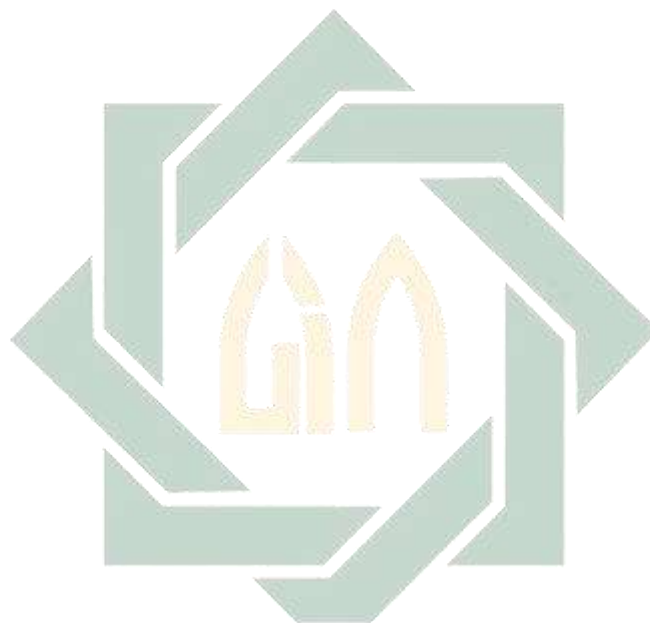
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022....	80
A. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	80
B. Perkembangan Pemaknaan <i>Open Legal Policy</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXI/2022	95
C. Perbandingan Pemaknaan <i>Open Legal Policy</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.....	101
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Putusan MK tentang <i>Open Legal Policy</i> Tahun 2005-2016.....	34
Tabel 2 Putusan MK tentang <i>Open Legal Policy</i> Tahun 2016 Hingga Sebelum Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.....	35
Tabel 3 Komparasi <i>Open Legal Policy</i>	48
Tabel 4 Perbandingan Putusan <i>Open Legal Policy</i>	57



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-III/2005
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27/PUU-V/2007
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 86/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU- XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU- XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU- XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU- XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PUU- XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PUU- XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 83/PUU- XIII/2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 59/PUU-VII/2009
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU- XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XV/2017
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 58/PUU-XVI/2018
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XVI/2018
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-XVII/2019
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XIX/2021
 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-XX/2022

Buku

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, 2006
 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020
 Guntur Hamzah,. *Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara*, 2016
 Imam Asmarudin et al. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia*, 2020.
 Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.
 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 2004
 Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, 2020.
 Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 2016
 Subarno et all, *Metode Penelitian Hukum*, 1967.
 Sadil Isra, *Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*, 2010
 Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, 2009

Disertasi

Laksono, Fajar. “Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015),” 2017.
 Wibowo, Mardian. “Makna ‘Kebijakan Hukum Terbuka’ Dalam Putusan

Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi,” 2017, 531.

Skripsi

Baihaki, Muhammad Reza. “Problematika *Open legal policy* Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi,” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Novritaloka, Elisa. “*Open legal policy* Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia,” (Skripsi, Palembang, Uuniversitas Sriwijaya, 2021)

Nst, Novaldy Azimi. “*Open legal policy* Pengaturan Presidential Threesold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia,” (Skripsi, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

Rosa Agustina, “Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata,” (Skripsi, Jakarta, Universitas Terbuka, 2014)

Sihaloho, Gunawan Lauresius. “Kebebasan Pembentuk Undang-Undang Dan Batasan Pengujian Undang-Undang Dalam Perspektif *Open legal policy* (Studi Putusan MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016 Dan Putusan MK No.24/PUU-XI/2013,” (Skripsi, Pematang Siantar, Universitas HKBP Nommensen, 2023).

Supriyadi, Tofik. “Analisis Yuridis Terhadap Concurring Opinion dan Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Prespektif *Open legal policy* ” (skripsi, Magelang, Universitas Tidar, 2024)

Jurnal

Abadi, M Husnu, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah. “Implication of Change the View Constitutional Court in *Judicial review* About *Open legal policy* Through the Constitutional Court’s Decision Number: 116/PUU-XXI/2023.” *International Conference on Law and Social Sciences (ICLSS 2024)*, 2024, 1–

23. <https://journal.uir.ac.id/index.php/icolss/article/view/18782>.

Agustina, Rosa. “Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perdata.” *Hukum Perdata*, 2020, 1–18. <http://repository.ut.ac.id/4053/1/HKUM4202->

M1.pdf.

Ahsanul Khuluqi, Mohammad, and Muwahid Muwahid. “Sejarah Sistem Pemerintahan Dan Kekuasaan Eksekutif Di Indonesia.” *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 2 (2024): 167–80. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>.

Aimatul Millah, Radian Salman. “Menguji *Open legal policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Gresik* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Ali Murtadho, Nazhif. “Paradigm for the Recruitment of Supreme Court Judges by the House of Representatives Is Part of Constitutional Political Intervention.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 462–80. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.394>.

Alvis, John E, John Emerich, Edward Dalberg, and Lord Acton. “The Corrupting Influence of Power in Shakespeare ’ S Plays the Corrupting Influence of Power in Shakespeare ’ S Plays” 4, no. 4 (2016).

Amalia, Riska Ari, Khairul Umam, and Rachman Maulana Kafrawi. “Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Studi Putusan No . 29 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan No . 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Ambang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden)” 6, no. 3 (2024): 525–33.

Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes.” *Lex privatum* 13, no. 1 (2024): 809–20. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.

Aritonang, Christian Daniel, Irwan Triadi, Hukum Universitas, Pembangunan Nasional, and Veteran Jakarta. “Peranan Lembaga-Lembaga Yudikatif Dalam Upaya Penegakan Konstitusi Hukum Di Indonesia” 8 (2024): 23429–34.

Arum, Sekar, Kusuma Jati, Sunny Ummul Firdaus, and Jadmiko Anom Husodo. “Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji

- Materiil (*Judicial review*) Pada Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023,” 2024, 156–68.
- Badruzzaman, Zaky. “Kepentingan Politik Jangka Panjang Mahkamah Konstitusi Dan Fenomena Judicialization Of Politics Pada Beberapa Putusannya.” *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1, no. 2 (2023): 131–55.
- Basniwati, AD, Rahmawati Kusuma, and Mahendra Wijaya Kusuma. “Pergeseran Fungsi Legislasi Di Indonesia.” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 178–84. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.512>.
- Bisariyadi, Mahkamah Peneliti Konstitusi, and Republik Indonesia. “Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. September 2015 (2015): 473–501.
- Bradley, Curtis A., and Eric A. Posner. “The Real Political Question Doctrine.” *Stanford Law Review* 75, no. 5 (2023): 1031–90. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4172365>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. “Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi Incorporation of Checks and Balances into Constitution.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 552–74.
- Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. “Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.
- Dramanda, Wicaksana. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2016): 617. <https://doi.org/10.31078/jk1141>.
- Elisa Eka Andriyani. “Analisis Pemberlakuan Pembagian Dan Pemisahan Kewenangan Di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers Dan Division of Powers).” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 534–40. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i4.1219>.

- Erham, Erham, Aman Ma'arij, and Gufran Gufran. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 72. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595>.
- Green, William Crawford. "Political-Question Doctrine." *The Encyclopedia of Civil Liberties in America: Volumes One-Three* 2 (2015): 723–24. <https://doi.org/10.4324/9781315699868-514>.
- Hamja, Buhar. "Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi." *Justisia* 7, no. 14 (2020): 248–53.
- Hidayat, Rivan, and Ritika Sahzana Adiba. "Reformulasi Kewenangan *Judicial review* Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2023): hlm. 40.
- Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara *Judicial Review*." *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'Iyyah* 1, no. 2 (2020): 263–77. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/18740>.
- Johar Arimurti, Danang. "Prosedur Pengajuan *Judicial review* Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap *Judicial Review*." *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 148–54. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/102>.
- Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum Dan Etika." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10753–60. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah." *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014, 1–114.

Kleidosty, Jeremy, and Ian Jackson. "Two Treatises of Government." *Two Treatises of Government*, 2017, 1–91.

<https://doi.org/10.4324/9781912282234>.

Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia (Problem and Solutions for Arranging of The Checks and Balances System in The Process of Making Law and Constitutional Review in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 12,no.1(2021):123–42.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1721>.

Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open legal policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi(Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

Melatyugra, Ninon, Umbu Rauta, and Indirani Wauran. "Overruling Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 368–90. <https://doi.org/10.31078/jk1826>.

Mima, Iryna, Vladyslav Yamkovyi, Ivan Kopaygora, and Nina Ivaniuk. "Legal Policy: The Latest Dimensions of Development" 129 (2020): 47–55.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.007>.

Muhammad Rechanda Haidir Madan. "Polemik Mahkamah Kontitusi Terhadap Pertimbangan *Open legal policy* Dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2024): 6726–38.

Nasir, Cholidin. "Judicial review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80.
<https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>.

Nazwa, Raudatun, Alifya Zhafira, Annisa Hamdah, and Mufti Wardani. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Mengawal Demokrasi Di Indonesia : Tinjauan Hukum Tata Negara" 2 (2025).

- Nolan, Michael J. Garcia Kate M. Manuel Andrew, And Attorney Editors. "The Constitution Of The United States Of America." *The Lancet* 180, no. 4657 (1912): 1549–50.
- Nurhalimah, Siti. "Penerapan Judicial Restraint Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *'Adalah* 1, no. 7 (2017): 65–66. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i7.9098>.
- Octavia, Nurul Aini. "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 16, no.2 (2022): 171. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765>.
- Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, and Feiby Wewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2023): 1–11.
- Pertiwi, Mahaarum Kusuma, and Praditya Wisaksono. "Konstitusionalitas *Open legal policy* Mengenai Kebijakan Earmarking Pajak Karbon Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1568>.
- Prasetio, Dicky Eko, and Adam Ilyas. "Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 13, no. 2 (2022): 247–65.
- Resma Bintani Gustaliza, Tasyah Roma Arta. "ANALISIS HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022" 4, no. 2 (2021): 21–31.
- Rishan, Idul. "Populisme Mahkamah Konstitusi Dalam Penafsiran Perkara-Perkara Pada Wilayah *Open legal policy* Idul Rishan * Departemen Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta ,

- Indonesia , Idul.Rishan@uii.Ac.Id , ORCID ID 0000-0002-189” 31, no. September (2024): 585–609.
- Romaliani, Karina, Muhammad Arsad, Nasution Adi, Syahputra Sirait, Kata Kunci, and : Pengawasan. “Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 1 (2021): 1–10. <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>.
- Safitri, Melani, and Arif Wibowo. “Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71–76. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.106>.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. “Open legal policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Siaga Putra Pulungan, Dio, and Ansorullah Ansorullah. “Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 53–63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>.
- Silaban, Virto, and Kosariza. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Limbago: Journal Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.
- Suganda, Ranga. “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Suparman, Odang. “Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System.” *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 59–75. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>.

- Umam, Khairul, Ashari Ashari, and Riska Ari Amalia. "Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila." *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 185–97. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.514>. Usaid. "Rule of Law Policy a Renewed Commitment To Justice, Rights, and Security for All Usaid Rule of Law Policy," no. April (2023).
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan." *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 139–46. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>.
- Werdiningsih, Mega Ayu. "Pro Kontra Penegakan Etik Secara Internal Dan Eksternal." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i1.1104>.
- Wibowo, Mardian. "Makna 'Kebijakan Hukum Terbuka' Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2017, 531.
- Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya, et al. "Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023).
- Yani, Ahmad. "Analisis Kontruksi Struktural Dan Kewenangan DPR Dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 348. <https://doi.org/10.31078/jk1526>.
- Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yusuf, Ahmat, Al Amin, Arif Wibowo, and Info Artikel. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, no. 1 (2023): 120. <https://journal.pbnsurabaya.co.id/>.